

**STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN
TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DIKELURAHAN BAGAN PETE
KOTA JAMBI**

SKRIPSI



Diajukan sebagai upaya memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Oleh:

Melaniya

H1A118038

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DIKELURAHAN BAGAN PETE KOTA JAMBI

Nama : Melaniya
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
NIM : H1A118038

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2
Untuk diujikan dalam Sidang Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 05 Februari 2025

Dosen Pembimbing 1

Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001

Dosen Pembimbing 2

Citra Darminto, S.IP., M.MP
NIP. 198205092024211001

LEMBAR PENGESAHAN

**STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN
TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DIKELURAHAN BAGAN PETE
KOTA JAMBI**

Nama : Melaniya
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
NIM : H1A118038

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan DewanPenguji Sidang
Skripsi Program Studi Ilmu PemerintahanFakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 10 Juli 2025

Dewan Penguji Sidang Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Michael Lega, S.IP., M.I.P.	Ketua Penguji	
2	Dr. Hartati, S.H., M.H.	Anggota	
3	Citra Darminto, S.IP., M.MP	Anggota	

Mengetahui.

Dekan Fakultas Hukum Univeritas Jambi

Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Allah SWT Yang Maha Esa

Kedua orang tuaku atas doa dan dukungan yang selalu diberikan selama ini

Kedua abang dan adikku dan teman-teman yang selalu memberikan semangat

Almamater tercinta Universitas Jambi

LEMBAR MOTTO

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat.
Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang
memiliki proses yang berbeda-beda.
percayalah Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik proses
yang kita anggap rumit”

-Melaniya-

SURAT PERNYATAAN

Nama : Melaniya
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
NIM : H1A118038
Judul : Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan
Tempat Pembuangan Sampah DiKelurahan Bagan Pete
Kota Jambi
Alamat :Gg. Bustamil Mukmin, Kenali Besar, Kec Kota Baru
No. Hp :082281031610

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan hasil peniruan atau penciplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk medapatkan gelar akademik, baik Universitas Jambi, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak dapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutab gelar yang telah diperoleh karena tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 10 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan

Melaniya

H1A118038

ABSTRACT

Waste management is a major environmental issue in urban areas, including in Bagan Pete Village, Jambi City. This study aims to examine the implementation of strategies undertaken by the Jambi City Environmental Agency in addressing waste disposal issues. The method used in this study is descriptive, qualitative, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that the Environmental Agency implements several key strategies, namely improving waste collection facilities, educating the public about household waste management, and collaborating with non-governmental organizations and local community leaders. However, several obstacles remain, such as limited collection vehicles, low community participation, and a lack of awareness of the importance of environmental cleanliness. This study recommends the need to strengthen synergy between parties and increase resource capacity to create a more effective and sustainable waste management system. The results show that the implementation of Regional Regulation (PERDA) Number 5 of 2020 has not been optimal due to a lack of infrastructure support and public awareness. Other inhibiting factors include limited land for TPS (landfills) and a culture of littering. However, community participation in cleanliness programs such as mutual cooperation (gotong royong) is starting to show positive impacts.

Keywords: *Strategy, Environmental Service, waste management, Bagan Pete, Jambi City*

ABSTRAK

Penanganan sampah menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan lingkungan di wilayah perkotaan, termasuk di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk implementasi strategi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam menangani permasalahan tempat pembuangan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup menerapkan beberapa strategi utama, yaitu peningkatan fasilitas pengangkutan sampah, edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga, serta kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat setempat. Namun demikian, beberapa kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan armada pengangkut, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sinergi antar pihak serta peningkatan kapasitas sumber daya untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2020 belum optimal karena kurangnya dukungan infrastruktur dan kesadaran masyarakat. Faktor penghambat lainnya meliputi keterbatasan lahan untuk TPS dan budaya membuang sampah sembarangan. Meski demikian, partisipasi masyarakat dalam program kebersihan seperti gotong royong mulai menunjukkan dampak positif.

Kata kunci: Strategi, Dinas Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah, Bagan Pete, Kota Jambi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Skripsi ini ditulis dengan judul **“STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DIKELURAHAN BAGAN PETE KOTA JAMBI”**.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Adi dan Ibunda Maisa, yang telah memberikan pengorbanan, kasih sayang, nasihat dan doa yang tiada henti mengiringi setiap langkahku. Tanpa bimbingan dan dukungan kalian penulis tidak akan sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan yang tiada terhingga. Terima kasih atas segala cinta dan pengorbanan yang tak ternilai, atas doa yang dipanjatkan, atas setiap lelah yang tak pernah kalian keluhkan, serta atas keikhlasan dalam mendukungku. kalian adalah anugrah terindah dalam hidupku.

Pada kesempatan kali ini, dengan setulus hati penulis turut menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., Rektor Universitas Jambi
2. Ibu Dr. Hartati, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kontribusi besar baik dalam bentuk motivasi maupun usaha untuk membangun Fakultas Hukum menjadi lebih maju.
3. Ibu Dr. Hj. Muksibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memudahkan penulis untuk melakukan penelitian dan instansi yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Bapak H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jambi, yang telah menyediakan fasilitas selama pendidikan.
5. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah membantu selama proses perkuliahan.
6. Bapak Rio Yusri Maulana S.IP., MIPol., Ph. D. Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
7. Bapak Alva Beriansyah, S.IP., M.IP., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi peneliti.
8. Dr. Saidina Usman. S.Sos., M.Phil., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama peneliti menempuh perkuliahan di

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

9. Ibu Dr. Hartati. S. H., M. H. Terima kasih kepada dosen pembimbing 1 saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan .
10. Bapak Citra Darminto, S. IP., M.MP Dosen pembimbing 2 saya yang telah meluangkan waktunya serta memberikan saran dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama peneliti menempuh perkuliahan di Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan.
12. Bapak/Ibu Administrasi Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Jambi yang telah membantu peneliti dalam pelayanan administrasi.
13. Kepada kedua saudara kandungku yang bernama Usman dan Salsabila yang selalu memberi dukungan dan perhatian kepada penulis, sehingga penulis teramat bersyukur telah memilikinya.
14. Informan selama kegiatan penelitian ini Bapak Firman Ariyanto, S.T selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Bapak Faisal Iskandar, A.md selaku Lurah Bagan Pete Kota Jambi, Nova Carla Carolina, S.pt selaku Sekretaris Lurah Bagan Pete Kota Jambi, serta masyarakat Lurah Bagan Pete Kota Jambi bersedia menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.
15. Sahabat penulis semasa perkuliahan, Reyni Anggraini Zalukhu, Antasya

Hasim, Yuliza Dwinanda, Linda Safitri, dan Erma Kristiana yang telah mendukung dan membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.

16. Seluruh teman-teman program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 yang telah menemani hari-hari penulis selama berada di Fakultas Hukum, terima kasih atas setiap kenangan dan dukungan yang diberikan.

Usaha dan upaya telah penulis dedikasikan untuk menghasilkan skripsi yang baik serta bermanfaat. Namun penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dalam kesalahan serta keterbatasan selama penyusunan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini mendatangkan manfaat bagi sumbangan pemikiran di bidang Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Hukum.

Jambi, 10 Juli 2025

Penulis,

Melaniya

H1A118038

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
LEMBAR MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR DIAGRAM	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Landasan Teori.....	13
1.6 Kerangka Berfikir	26
1.7 Metode Penelitian.....	27
1.7.1 Jenis Penelitian.....	27
1.7.2 Lokasi Penelitian.....	28

1.7.3 Fokus Penelitian.....	29
1.7.4 Sumber Data.....	29
1.7.5 Teknik Penentuan Informan	29
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data	30
1.7.7. Teknik Analisis Data.....	31
1.7.8 Keabsahan Data.....	34
BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	35
2.1 Gambaran Umum Kota jambi.....	35
2.1.1 Visi dan Misi Kota Jambi	36
2.1.2 Kondisi Geografis dan Pemerintahan Kota Jambi	37
2.1.3 Kondisi Demografis Kota Jambi.....	38
2.2 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	38
2.3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	40
2.3.1 Struktural Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	42
2.3.2 Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup	44
2.3.3 Tugas dan Fungsi	44
2.4 Kelurahan Bagan Pete	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
3.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bagan Pete	
Kota Jambi	49
3.1.1 Komunikasi.....	49
3.1.2 Sumber Daya	51

3.1.3 Disposisi.....	52
3.1.4 Struktur Birokrasi.....	54
3.2 Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Tempat Pembuangan Sampah di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi.	56
BAB IV PENUTUP.....	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Dinas Lingkungan Hidup Tentang Sampah Kota Jambi	5
Tabel 1. 2 Data Dinas Lingkungan Hidup Tentang Sampah Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi Tahun 2023	6
Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Pembagian Daerah.....	37

DAFTAR DIAGRAM

2. 1 Logo Kota Jambi.....	36
2. 2 Struktural Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara.....	65
2. Surat Penelitian.....	68
3. Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian.....	69
4. Dokumentasi Wawancara.....	71
5. Curriculum Vitae.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang penelitian

Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu utama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup di Kota Jambi, termasuk di Kelurahan Bagan Pete. Dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas perkotaan yang terus meningkat, volume sampah yang dihasilkan juga semakin besar, menyebabkan tekanan besar terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada. Kelurahan Bagan Pete merupakan salah satu wilayah di Kota Jambi yang menghadapi tantangan besar dalam mengelola tempat pembuangan sampah. Dalam konteks ini, peran Dinas Lingkungan Hidup sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam penanganan sampah¹.

Permasalahan sampah menjadi masalah yang cukup krusial dan sulit untuk diatasi. Berbagai cara dan kinerja pemerintah telah dilakukan dalam mengatasi hal tersebut, namun volume sampah dari tahun ke tahun terus meningkat dan semakin bertambah banyak. Baik sampah rumah tangga maupun sampah skala besar, seperti rumah makan, limbah perusahaan dan lainnya. Terbatasnya lahan dalam pengelolaan sampah yang kian meningkat disebabkan oleh pembangunan-pembangunan lahan yang menyebabkan berkurangnya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) untuk pengelolaan sampah².

¹ Sutrajad. 2010. Kiat Pengembangan Tempat Sampah Melalui Wirausaha jakarta:PT.Bumi Aksara.

² Bambang H. S. 2017. Manajemen Sampah: Teori dan Praktik. Penerbit Gemulun Indonesia

Meningkatnya volume produksi industri dan kegiatan manusia, maka sampah akan semakin meningkat dari jumlah volume yang sebelumnya, sedangkan dari proses pengolahan sampah dan penggunaan sampah daur ulang yang dihasilkan cenderung sangat kecil, sehingga tidak berdampak banyak. Berbagai permasalahan pun hadir dari meningkatnya volume sampah dan terbatasnya TPA, dapat menyebabkan berbagai masalah baik yang dirasakan langsung atau secara tidak langsung bagi masyarakat yang berada di kota dan maupun masyarakat yang berada disekitarnya³.

Pemahaman mengenai Standar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) / Pusat Pengolahan Sampah yang disusun BSILHK dapat diartikan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulangan, pengolahan dan pemroses akhir sampah. Sehingga standar ini bertujuan sebagai bentuk acuan/pedoman dalam menentukan Tempat Pengolahan Sampah yang terpadu sesuai standar yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan aturan UU No. 18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan Sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Indonesia secara umum⁴. UU ini memberikan dasar hukum untuk upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah agar lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

³ Kartika, Fitriani, & Rifai, Ahmad. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.. Jurnal Penerbit Lokal, Vol 2 No 3. Hlm 23-35

⁴ Pemerintah Pusat, Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008

Permasalahan sampah juga memiliki dampak yang kompleks terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Akumulasi sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, serta kerusakan ekosistem yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia⁵. Kelurahan Bagan Pete sebagai salah satu bagian dari Kota Jambi juga menghadapi tantangan serupa dalam mengelola sampah. Keterbatasan lahan untuk pembuangan sampah akhir, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor-faktor utama yang perlu diatasi.

Untuk menangani persoalan sampah dibutuhkan strategi pengelolaan sampah optimal, untuk tercapainya strategi ini dibutuhkan partisipasi masyarakat dan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak agar strategi yang dilaksanakan dapat menyelesaikan persoalan pengelolaan tempat sampah. Persoalan terkait sampah juga menjadi PR bagi Provinsi Jambi, terkhusus pada wilayah Kota Jambi yang padat penduduk. Diketahui bahwa tingkat produksi sampah di Kota Jambi sangat tinggi, di mana dalam perharinya dapat mencapai 330 hingga 350 ton. Permasalahan mengenai pengelolaan tempat pembuangan sampah di Kota Jambi juga dirasakan oleh wilayah Kelurahan Bagan Pete. Adapun permasalahan yang terjadi di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi dalam pengelolaan sampah yaitu :

⁵ Mei Sari. 2020. Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Perspektif Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung.

1. Kurangnya Infrastruktur Pengelolaan Sampah: Kelurahan Bagan Pete mungkin menghadapi masalah dalam infrastruktur pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan sampah yang tidak memadai atau sistem pengumpulan sampah yang kurang efisien⁶.
2. Kurangnya Armada Pengangkut: Volume sampah yang tidak memadai pengangkutannya menyebabkan penumpukan sampah. Warga sempat memblokir Jalan TB Sriwijaya karena truk hanya datang sekali per hari, padahal seharusnya empat kali⁷.
3. Kesadaran Masyarakat: Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah dengan benar dan menjaga kebersihan lingkungan juga dapat menjadi permasalahan. Kurangnya kesadaran dapat menyebabkan adanya perilaku pembuangan sampah sembarangan atau kurangnya partisipasi dalam program pengelolaan sampah yang ada⁸.
4. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur juga dapat menjadi permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete⁹.

⁶ <https://jambi.pikiran-rakyat.com/jambi-raya/pr-3469419258/warga-antusias-gotong-royong-tapi-keluhkan-jalan-rusak-dan-drainase-buruk-di-bagan-pete/>

⁷ <https://www.radarjambi.co.id/amp/2018/12/09/18635/warga-4-kelurahan-blokir-jalan-tb-sriwijaya-kesal-garagara-sampah-menumpuk/>

⁸ Anggunisa Heryeni, S. S., Syarifuddin, H., & Ilham, I. (2024). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Persepsi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui TPS 3R Sular Berkah dan Makmur Jaya di Kota Jambi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 6(2), 40–51

⁹ <https://www.unja.ac.id/dosen-prodi-kesmas-latih-warga-mengolah-sampah-rumah-tangga-menjadi-pupuk-organik-cair/>

**Tabel 1. 1 Data Dinas Lingkungan Hidup Tentang Sampah Kota Jambi
Tahun 2023**

NO.	Bulan	Jenis Sampah	Volume (ton)
1	Januari	Organik	150
		Anorganik	100
2	Februari	Organik	160
		Anorganik	110
3	Maret	Organik	155
		Anorganik	105
4	April	Organik	145
		Anorganik	95
5	Mei	Organik	140
		Anorganik	90
6	Juni	Organik	135
		Anorganik	85
7	Juli	Organik	130
		Anorganik	80
8	Agustus	Organik	125
		Anorganik	75
9	September	Organik	120
		Anorganik	70
10	Oktober	Organik	115
		Anorganik	65
11	November	Organik	110
		Anorganik	60
12	Desember	Organik	105
		Anorganik	35
Total		Or : 1.575 Ton	2.580 Ton
		An : 1.005 Ton	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Tabel di atas menampilkan data sampah di Kota Jambi selama tahun 2023, dengan detail volume sampah (dalam ton) yang terbagi berdasarkan jenis sampah (organik dan anorganik) setiap bulannya. Data ini biasanya dicatat oleh Dinas Lingkungan setiap bulan untuk memantau dan mengelola pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Tabel 1. 2 Data Dinas Lingkungan Hidup Tentang Sampah Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi Tahun 2023

NO.	Bulan	Jenis Sampah	Volume (kg)
1	Januari	Organik	500
		Anorganik	300
2	Februari	Organik	550
		Anorganik	320
3	Maret	Organik	520
		Anorganik	330
4	April	Organik	490
		Anorganik	310
5	Mei	Organik	480
		Anorganik	300
6	Juni	Organik	470
		Anorganik	290
7	Juli	Organik	460
		Anorganik	280
8	Agustus	Organik	450
		Anorganik	270
9	September	Organik	440
		Anorganik	260
10	Oktober	Organik	430
		Anorganik	250
11	November	Organik	420
		Anorganik	240
12	Desember	Organik	410
		Anorganik	230
Total		Or : 5.640 kg 5.64 Ton	9.010 kg 9.01 Ton
		An: 3.370 kg 3.37 Ton	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Table diatas menampilkan data sampah di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi, selama tahun 2023. Data ini mencakup volume sampah (dalam kilogram) yang terbagi berdasarkan jenis sampah (organik dan anorganik) setiap bulannya.

Data ini umumnya dicatat oleh Dinas Lingkungan setiap bulan untuk memantau dan mengelola pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete. Jadi total sampah Kota Jambi dalam tahun 2023 adalah 2580 ton, sementara total sampah Kelurahan Bagan Pete adalah 9.01 ton.

Sampah dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, kesehatan manusia, ekonomi, dan kehidupan sosial. Berikut adalah beberapa dampak utama dari sampah:

1. Pencemaran Lingkungan: Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan. Limbah padat limbah cair, dan limbah gas yang dihasilkan dari sampah dapat mencemari udara, air, dan tanah, mengakibatkan kerusakan ekosistem alam dan menurunkan kualitas lingkungan hidup¹⁰.
2. Kesehatan Masyarakat: Sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat menjadi sarang penyakit. Pembuangan sampah yang sembarangan dapat menyebabkan penyebaran penyakit melalui air, udara, atau vektor seperti nyamuk dan tikus. Sampah juga dapat mengakibatkan keracunan dan infeksi jika terjadi kontak langsung dengan manusia¹¹.
3. Kerusakan Ekosistem: Sampah dapat mengganggu keseimbangan ekosistem alam.

Contohnya, pembuangan sampah plastic dilaut dapat mengancam

¹⁰ Putri, R. D., & Hadi, S. (2020). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Lingkungan di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Lingkungan, 18(1), 67-75

¹¹ WHO (World Health Organization). (2015). *Water, Sanitation and Hygiene in Health Care Facilities*. Geneva: WHO Press.

keberlanjutan ekosistem laut dan menyebabkan kerusakan pada biota laut seperti ikan, burung, dan hewan laut lainnya¹².

4. Kerugian Ekonomi: Pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat dan pemerintahan.

Misalnya, biaya untuk membersihkan dan mengelola sampah yang mencemari lingkungan dapat menjadi beban finansial yang besar bagi pemerintah. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat sampah juga dapat mengganggu sektor pariwisata dan pertanian, mengurangi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat¹³.

5. Ketidaknyamanan Sosial: Kondisi lingkungan yang kotor dan tercemar oleh sampah dapat menciptakan ketidaknyamanan sosial bagi masyarakat. Lingkungan yang tidak sehat dan tidak nyaman dapat mengurangi kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat, serta mempengaruhi interaksi sosial antar individu¹⁴.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah adalah sebuah peraturan yang mengatur tata cara memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah kota jambi untuk mengatur berbagai aspek terkait dengan pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya adalah pengurangan sampah di sumber, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolaan, dan pembuangan sampah

¹² Kurniawan, T. A., et al. (2021). Challenges and strategies for sustainable plastic waste management in Indonesia. *Environmental Science & Policy*, 123, 1-11.

¹³ BPS Kota Jambi. (2023). *Laporan Statistik Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023*. Jambi: BPS Kota Jambi

¹⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2019). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. Jakarta: KLHK.

akhir¹⁵. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah penting untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan efektif dalam upaya mengelola sampah secara bertanggung jawab demi menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Jambi¹⁶.

Fokus penelitian ini ialah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bagan Pete, dengan menitikberatkan pada tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah yang ada.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diketahui mengenai terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku membuang sampah sembarangan oleh masyarakat dan mengetahui bagaimana caranya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk proses mengelola dan memanfaatkan sampah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengintervensi dengan program Pengelolaan Sampah Mandiri dan Penjemputan Sampah Terpilah (PESAN JEPAPAH)¹⁷. Meningkatkan kesadaran penuh serta pemahaman warga terkhusus masyarakat yang berada di Kelurahan Bagan Pete, mengenai Pengelolaan Sampah Mandiri dan Penjemputan Sampah Terpilah, dan meningkatkan partisipasi serta pengetahuan warga melalui program JEPAPAH yang telah berhasil sebelumnya di Jepara yang dapat dijadikan percontohan bagi daerah lain, serta meningkatkan kerja

¹⁵ Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2022

¹⁶ Peraturan Walikota Kota Jambi tentang Penanganan Tempat Pembuangan Sampah.

¹⁷ Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintahan Daerah Kota Jambi.

sama dan peran serta setiap warga dan para tokoh masyarakat, dan pemerintah sebagai support system dalam pelaksanaan Program tersebut¹⁸.

Untuk mengetahui fokus masalah pada penelitian ini agar penelitian yang dilakukan nantinya memiliki keunikan, perbedaan, dan merupakan penelitian yang baru serta penting dilakukan. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini mejabarkan penelitian-penelitian terdahulu yang tentunya memiliki keterkaitan tema yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, peneliti dengan judul “Kepemimpinan Lurah Dalam Pengelolaan Bank Sampah Di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau” yang ditulis oleh Agung Nurrahman dkk.

Peneliti tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui sumber data wawancara terstruktur, dokumentasi dan observasi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu penelitian yang akan dilakukan berfokus pada strategi pengelolaan tempat sampah di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agung Nurrahman dkk, berfokus pada kepemimpinan lurah dalam pengelolaan bank sampah di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau¹⁹. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rike Martha Yulia dengan judul penelitiannya “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh

¹⁸ Dinda Clasissa Aulia, dkk. “*Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskemas)*”. Vol.1, No.1, April 2021, Hal. 62-70 DOI:doi.org/10.31849/pengmaskemas.v1i1/5516. P-ISSN 2809-6428 | E-ISSN 2809-5251

¹⁹ Agung Nurrahman, dkk, “*Kepemimpinan Lurah Dalam Pengelolaan Bank Sampah Di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*”, Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik, Vol. 3, No. 1, Februari 2021, hlm. 13-27

Besar²⁰. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, observasi dan wawancara. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang dilakukan Rike, yaitu bahwa penelitian yang dilakukan Rike berfokus pada efektivitas pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar²⁰. Penelitian ketiga dilakukan oleh Trio Saputra dkk dengan penelitian “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah”.

Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Perbedaan penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengelolaan tempat sampah.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik mengangkat sebuah judul Proposal Skripsi dengan judul ***“Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Tempat Pembuangan Sampah Di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

²⁰ Rike Martha Yulia, “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Aceh Besar, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Negeri Ar-Ranir, 2021.

1. Bagaimamana implementasi kebijakan pengelolaan sampah dikelurahan Bagan Pete, kota Jambi?
2. Bagaimana strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan tempat pembuangan sampah di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi tingkat implementasi kebijakan tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi, dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
2. Untuk mengukur strategi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan tempat pembuangan sampah di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi, khususnya dalam mengatasi permasalahan infrastruktur pengelolaan sampah dan peningkatan volume sampah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian dapat memberikan penjelasan terkait dengan strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengelolaan tempat pembuangan sampah di Kota Jambi dan dampaknya terhadap perubahan sosial masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk selanjutnya dalam bidang yang sama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan memperkaya keilmuan pemberdayaan masyarakat melalui

strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengelolaan tempat pembuangan sampah di Kota Jambi, dan memberikan sumbangan pemikiran kepada akademis dan menggali potensi.

1.5. Landasan Teori

Dalam rangka pemahaman terkait implementasi kebijakan strategi dinas lingkungan hidup dalam penanganan tempat pembuangan sampah dikelurahan bagan pete dikota jambi, maka diperlukan beberapa konsep dan teori yang dijadikan dasar dan referensi terhadap arah penelitian. Beberapa konsep dan teori untuk dijadikan dasar untuk menganalisis penelitian ini sebagaimana diperlihatkan dibawah. Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan proses dari rumusan kebijakan menjadi Tindakan kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

1.5.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan proses dari rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Implementasi dijadikan sebagai usaha untuk membangun hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan untuk dapat terealisasi sebagai suatu hasil dari kegiatan pemerintah. James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok untuk memecahkan suatu masalah tertentu²¹. Kebijakan merupakan bagian dalam

²¹ M. Irfan Islamy, 2016, Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara) Hlm.17

pemerintah yang tidak hanya menyangkut aparatur negara tetapi juga menyangkut bagaimana mengelola sumber daya publik. Implementasi jika dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa kebijakan bukan hanya dirumuskan lalu dibuat tetapi sebuah kebijakan harus diimplementasikan untuk menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Van meter dan Van horn mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan berupa usaha yang dilakukan atas keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan²². Mazmanian dan Sabatier secara lebih lengkap mendefinisikan implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya²³. Teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu²⁴:

²² Joko Pramono, 2020, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: Unisiri Press) Hlm.3

²³ *Ibid*, Hlm.13

²⁴ Leo Agustino, 2012, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta) Hlm. 149-153

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan dimana yang menjadi tujuan harus dikomunikasikan. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para pelaksana akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu pertama transmisi, dimana dengan penyampaian komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Kedua Kejelasan, yang mana komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Dan yang ketiga Konsistensi, dimana perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas serta tidak berubah-ubah agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana.
2. Sumber daya, keberhasilan implementasi selain ditentukan oleh komunikasi juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki para implementor. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu, staf sebagai sumber daya utama diperlukan kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Selanjutnya, informasi memiliki dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Kemudian, wewenang dimana otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Terakhir, fasilitas baik fisik maupun pendukung

berupa sarana dan prasarana merupakan faktor penting agar kebijakan dapat berjalan optimal.

3. Disposisi, menyangkut sikap yang dimiliki pelaksana kebijakan seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi dan lain-lain yang menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya sekedar mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.
4. Struktur birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang Standard Operational Procedures atau SOP. SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan.

1.5.2 Strategi pemerintah

Strategi pemerintahan merupakan suatu perencanaan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan terarah yang disusun oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dan penyelenggaraan negara secara efektif dan efisien. Strategi ini melibatkan perumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Dalam konteks ini, strategi pemerintahan bukan hanya sekedar rencana, tetapi juga mencakup langkah-langkah implementasi dan

evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan agar program dan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Kurniawan dan Sihombing “Strategi pemerintahan merupakan arah kebijakan yang dirancang oleh lembaga pemerintah untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan dengan memperhatikan efektivitas kebijakan, efisiensi sumber daya, dan partisipasi masyarakat.” Strategi ini dibentuk melalui proses perencanaan partisipatif dan digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara terarah dan terukur²⁵.

Yuliana ia menyatakan “Strategi pemerintahan adalah upaya sistematis dan terukur yang digunakan oleh pemerintah untuk merespon tantangan kebijakan publik secara cepat dan adaptif, baik dalam kondisi normal maupun darurat.” Hal ini mencakup fleksibilitas dalam kebijakan serta peran kolaboratif antar sektor²⁶. Strategi pemerintahan yang efektif mencakup beberapa elemen utama sebagai berikut:

1. Perumusan Visi dan Misi: Pemerintah perlu memiliki arah jangka panjang yang jelas sebagai dasar kebijakan publik.
2. Analisis Lingkungan Strategis: Pemerintah harus memahami tantangan dan peluang yang muncul dari lingkungan internal dan eksternal.

²⁵ Kurniawan dan Sihombing, “Tata Kelola Pemerintahan dan Strategi Pembangunan,” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 2 (2020): 115–123.

²⁶ Yuliana, “Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan COVID-19,” *Jurnal Governance and Civil Society (JGCS)*, Vol. 2, No. 1 (2021): 42–50

3. Penentuan Tujuan Strategis: Tujuan yang hendak dicapai harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).
4. Formulasi Kebijakan dan Program: Strategi diwujudkan melalui kebijakan yang konkret dan program kerja operasional.
5. Implementasi dan Evaluasi: Pelaksanaan strategi membutuhkan pengawasan serta penyesuaian berkala untuk meningkatkan efektivitas.

Dalam pelaksanaannya, strategi pemerintahan juga mencakup penyesuaian terhadap kondisi lokal, manajemen konflik kepentingan, serta upaya memperkuat tata kelola yang transparan.²⁷

1.5.3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk menangani sampah sejak dari sumber hingga ke tahap akhir. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk membuang sampah, tetapi juga mengatur proses pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, dan pembuangan akhir dengan cara yang aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

²⁷ Bryson, John M. *Perencanaan Strategis untuk Organisasi Publik dan Nirlaba: Panduan untuk Memperkuat dan Mempertahankan Kinerja Organisasi*. Edisi ke-3. San Francisco: Jossey-Bass, 2004.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu:²⁸

1. Pengurangan sampah, yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
2. Penanganan sampah, yang mencakup kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Tujuan dari pengelolaan sampah menurut undang-undang tersebut adalah untuk:

1. Meningkatkan kesehatan Masyarakat

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, wilayah dengan sistem pengelolaan sampah yang buruk memiliki prevalensi penyakit lingkungan yang lebih tinggi dibanding wilayah yang memiliki sistem persampahan terkelola.²⁹ Oleh karena itu, melalui pengelolaan sampah yang terencana dan tepat, pemerintah dapat mengintervensi faktor risiko kesehatan di lingkungan masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tujuan kedua dari pengelolaan sampah adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup, baik secara fisik (tanah, air, dan udara), maupun secara estetika (kebersihan dan kenyamanan ruang publik). Sampah yang dibuang

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

²⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Umum Pengelolaan Sampah untuk Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Dirjen P2P, hlm. 5.

sembarangan kesungai dapat menyebabkan pencemaran air dan menimbulkan banjir. Demikian pula, pembakaran sampah secara terbuka menyebabkan pencemaran udara. Menurut KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), indikator kualitas lingkungan dapat dilihat dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, serta pengelolaan sampah di darat dan laut.³⁰ Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti: Komposter skala rumah tangga, pengelolaan sampah organik menjadi pupuk, daur ulang sampah anorganik (plastik, kertas, logam), Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak lagi sekadar persoalan teknis, tetapi menjadi bagian dari upaya pelestarian lingkungan hidup secara luas.

3. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis.

Pandangan terhadap sampah kini telah berubah. Jika dulu sampah hanya dianggap sebagai limbah tak berguna, saat ini ia dipandang sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dikelola untuk mendatangkan manfaat. Hal ini mencerminkan pendekatan ekonomi sirkular (*circular economy*), yang bertujuan meminimalkan limbah dan memaksimalkan nilai guna dari suatu produk melalui prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R).

Contoh pemanfaatan sampah sebagai sumber daya antara lain:

1. Bank Sampah, tempat masyarakat menabung sampah anorganik yang akan ditukar dengan uang atau kebutuhan pokok.

³⁰ KLHK. (2021). *Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020–2024*. Jakarta: KLHK Press

2. Kompos rumah tangga, dari limbah dapur dan daun-daunan, yang bisa digunakan untuk pertanian urban (urban farming).
3. Kerajinan daur ulang, seperti tas dari bungkus kopi, bunga dari sedotan plastik, atau paving block dari limbah plastik.

Menurut data dari SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), tahun 2023 tercatat lebih dari 12 juta ton sampah di Indonesia berpotensi untuk didaur ulang, namun hanya sekitar 10–12% yang benar-benar dimanfaatkan secara ekonomi.³¹ Artinya, masih banyak potensi ekonomi dari sektor persampahan yang belum tergarap secara optimal.

Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya peran serta masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya urusan teknis, melainkan juga urusan sosial dan ekonomi yang harus ditangani bersama-sama.

Sementara itu pengelolaan sampah merupakan suatu sistem yang melibatkan kegiatan berbagai aspek mulai dari teknis, administratif, sosial, hingga lingkungan. Sistem ini bertujuan untuk membuang limbah, serta juga untuk meminimalisir dampak negatif sampah terhadap Kesehatan dan ekosistem.

Pengelolaan ini harus dilakukan secara:

³¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*.

1. Aman (tidak membahayakan kesehatan masyarakat)

Pengelolaan sampah harus menjamin bahwa proses pengumpulan, penyimpanan, dan pembuangan tidak menimbulkan risiko kesehatan. Hal ini penting karena sampah yang menumpuk tanpa pengelolaan yang baik dapat menjadi sumber penyakit seperti diare, demam berdarah, infeksi kulit, hingga gangguan pernapasan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tumpukan sampah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik akan mencemari lingkungan sekitar dan meningkatkan risiko penularan penyakit berbasis lingkungan, terutama di kawasan permukiman padat penduduk³². Sampah juga menjadi tempat berkembang biaknya hewan seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Oleh sebab itu, pengelolaan yang aman menuntut pemisahan antara limbah domestik biasa dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), serta penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengangkut.

2. Ekonomis (efisien secara biaya)

Sistem pengelolaan sampah yang baik tidak hanya dilihat dari keamanannya, tetapi juga dari aspek keekonomian. Dalam hal ini, biaya operasional (seperti bahan bakar kendaraan angkut, gaji tenaga kerja, pemeliharaan sarana, dan infrastruktur) harus dirancang seefisien mungkin agar tidak membebani anggaran pemerintah daerah. Selain itu, pendekatan

³² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Pedoman Umum Pengelolaan Sampah untuk Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, hlm. 10–11.

ekonomis juga mencakup potensi pengelolaan sampah sebagai sumber pendapatan, seperti dari hasil daur ulang, kompos, dan pemanfaatan sampah anorganik sebagai produk kerajinan atau industri kecil. Hal ini sejalan dengan pandangan Kusumastuti, bahwa pengelolaan sampah dapat menjadi peluang ekonomi berbasis masyarakat jika dikelola dengan pendekatan kreatif dan partisipatif³³. Konsep bank sampah dan industri kreatif berbasis limbah adalah contoh bagaimana pengelolaan sampah dapat memberikan dampak ekonomi positif kepada masyarakat.

3. Efisien (menggunakan sumber daya secara optimal)

Efisiensi yang dimaksud dalam pengelolaan sampah berarti memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang terbatas. Misalnya, penggunaan armada pengangkut yang disesuaikan dengan volume dan rute sampah agar tidak terjadi pemborosan waktu dan bahan bakar. Efisiensi juga melibatkan optimalisasi penggunaan tempat pembuangan akhir, pengurangan volume sampah di sumber, serta pelibatan teknologi yang tepat guna. Menurut Sujatmiko, pemilahan sejak dari rumah tangga adalah kunci efisiensi sistem pengelolaan sampah modern³⁴. Dalam banyak kasus, pengelolaan sampah yang efisien terjadi ketika pemilahan dilakukan sejak dari rumah tangga, sehingga beban di TPS atau TPA dapat dikurangi secara signifikan.

³³ Kusumastuti, D. (2020). "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat: Studi Kasus di Beberapa Daerah Perkotaan." *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 8(2), 45–58.

³⁴ Sujatmiko, H. (2019). *Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Berbasis Partisipasi Publik*. Jakarta: Yayasan Lestari Hijau

4. Ramah lingkungan (tidak merusak ekosistem dan sumber daya alam)

Aspek ramah lingkungan mengacu pada prinsip bahwa seluruh kegiatan pengelolaan sampah harus meminimalkan dampak negatif terhadap tanah, air, dan udara. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pengelolaan sampah yang ramah lingkungan harus mendorong praktik pemilahan dari sumber, pengurangan sampah, pengomposan untuk sampah organik, serta daur ulang untuk sampah anorganik³⁵. Misalnya, sampah organik yang tidak ditangani dengan baik dapat menghasilkan gas metana yang merupakan gas rumah kaca berbahaya. Oleh karena itu, pengomposan menjadi alternatif pengelolaan ramah lingkungan. Demikian pula, pembakaran sampah terbuka yang menghasilkan dioksin harus dihindari. Sebaliknya, sistem sanitary landfill atau pengolahan sampah menjadi energi dapat dipertimbangkan jika memenuhi syarat teknis dan lingkungan.

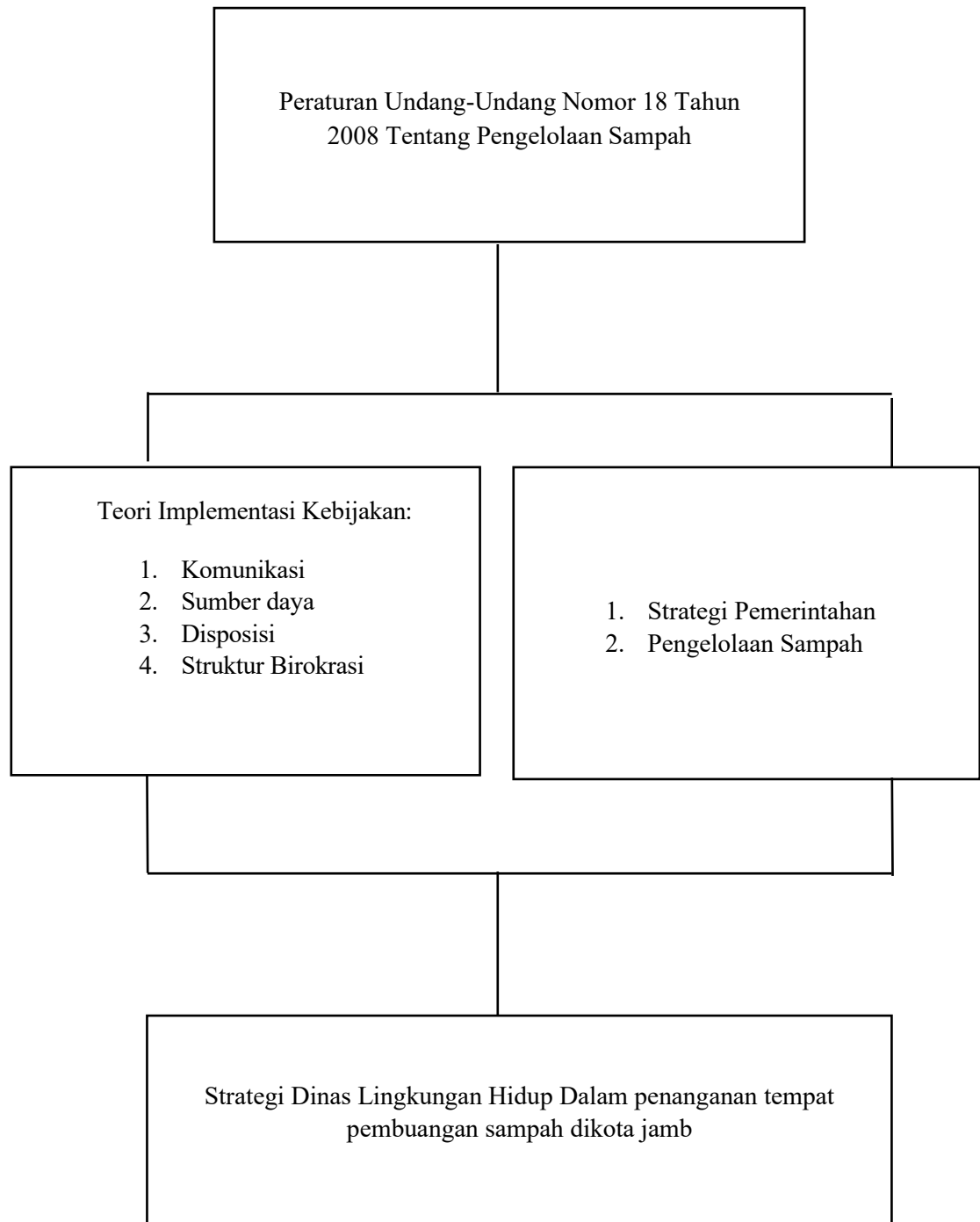
Pengertian ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan sistem terpadu yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan secara sinergis antara semua pihak yang terlibat, mulai dari rumah tangga sebagai penghasil sampah, pemerintah sebagai pengelola, hingga industri daur ulang sebagai pemanfaat akhir.

³⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: KLHK, hlm. 45.

Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya difokuskan pada aspek teknis pembuangan, melainkan juga menyangkut nilai sosial, ekonomi, hukum, serta perilaku masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sampah menjadi elemen penting dalam menciptakan kota yang sehat, produktif, dan berdaya tahan lingkungan.³⁶

³⁶ Tchobanoglous, George, Hilary Theisen, dan Samuel A. Vigil. *Manajemen Sampah Padat Terpadu: Prinsip-Prinsip Teknik dan Isu-isu Manajemen*. New York: McGraw-Hill, 1993.

1.6 Kerangka Berfikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam kasus ini, penelitian kualitatif dapat membantu dalam memahami implementasi kebijakan, efektivitas strategi pengelolaan sampah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas masalah dan dinamika yang terlibat dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal. Menurut Erickson 1968 menyatakan penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka³⁷. Sedangkan menurut Denzin & Lincoln 1987 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen³⁸.

³⁷ 10Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018)hlm.7

³⁸ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)hlm.5

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian dimana terdapat proses memahami fenomena yang terjadi melalui berbagai metode ilmiah dan disimpulkan dengan bentuk deskripsi berupa kata-kata. menurut Moleong tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman secara mendalam³⁹.

Menurut Sugiyono ciri-ciri metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang ditemukan di lapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan masyarakat di sekitar Kelurahan Bagan Pete. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. sebagai unit analisis dalam penelitian ini khususnya pada strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam penanganan tempat pembuangan sampah di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi.

Wilayah ini dipilih karena merupakan fokus penelitian dan tempat di mana masalah yang diteliti terjadi secara nyata. Dengan memilih lokasi penelitian yang spesifik, peneliti dapat lebih mendalam dalam memahami konteks lokal, dinamika sosial, dan permasalahan yang ada. Selain itu, penelitian di lokasi yang relevan juga memungkinkan peneliti untuk bekerja sama dengan pihak terkait,

³⁹ Moleong, Op. Cit, hlm. 4

seperti pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, dan masyarakat setempat, untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik dan memperoleh data yang diperlukan.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi. Serta dampak solusi dari pengelolaan penanganan tempat pembuangan sampah di kelurahan bagan pete kota jambi.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan skunder. Data primer yaitu dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara mengobservasi dan wawancara selama kegiatan penelitian berlangsung. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan memanfaatkan literatur seperti buku, jurnal, media online, penelitian terdahulu, dokumen grafis (tabel, catatan, rapat, notulen, dll) foto-foto, rekaman video atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan peneliti dalam menentukan informan adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik dalam penentuan informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian berdasarkan ciri-ciri atau kriteria yang telah ditentukan dianggap mempunyai

informasi serta data-data yang diperlukan bagi penelitian.

Dalam hal ini peneliti memilih informan atau narasumber yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan guna memperoleh data yang akurat. Maka dalam peneliti menetapkan informan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Bapak Firman Ariyanto (Kasi Lingkungan Hidup Kota Jambi)
2. Bapak Faisal Iskandar (Lurah Bagan Pete Kota Jambi)
3. Bapak Toni (Masyarakat Kelurahan Bagan Pete)
4. Ibu Neli (Masyarakat Kelurahan Bagan Pete)
5. Ibu Neneng (Masyarakat Kelurahan Bagan Pete)
6. Ibu Eni (Masyarakat Kelurahan Bagan Pete)

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, untuk itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala – gejala yang diteliti⁴⁰. Menurut Marshall melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut⁴¹. Artinya bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung

⁴⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 52

⁴¹ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm.106

tempat dilakukannya penelitian.

- b. Wawancara, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan selanjutnya adalah teknik wawancara. Wawancara menurut Bogdan dan Biklen ialah percakapan yang memiliki tujuan, biasanya dilakukan antara dua orang atau lebih yang diajukan oleh salah seorang dengan tujuan memperoleh informasi atau keterangan⁴². Menurut Susan Stainback dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi atau fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi⁴³. Jadi, dapat disimpulkan wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan baik yang telah disusun maupun secara langsung kepada seorang untuk dimintai informasi terkait permasalahan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian, dokumen digunakan sebagai alat pendukung untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik wawancara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan dokumentasi berupa gambar-gambar kegiatan operasional dan lokasi pada Kelurahan Bagan Pete. Selain berupa gambar, dokumentasi lain yang didapatkan penelitian berupa tulisan dan data-data pendukung.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode

⁴² Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: Citapusaka Media, 2012) hlm 119

⁴³ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 114

penelitian ilmiah, sebab melalui analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah-masalah penelitian⁴⁴. Tahap analisis ini sangat menentukan, karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang kebenaran-kebenaran yang dapat dipahami untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dengan kata lain data yang dikumpulkan dan digunakan untuk memecahkan masalah sekaligus untuk menyarankan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam mencapai tujuan. Analisis data ini digunakan untuk menggambarkan Strategi dinas lingkungan hidup dalam penanganan tempat pembuangan sampah di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Data-data yang telah dikumpulkan baik melalui wawancara maupun dokumentasi sebelum digunakan/ditampilkan telah diproses melalui pencatatan, pengelompokkan, membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasikan, sehingga dapat mempermudah dalam menarik kesimpulan. Model analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakan, dan mentransformasikan data yang

⁴⁴ Nazir, moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hlm. 405

mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang tadinya transkrip wawancara tersebut dipilih-pilih untuk mendapatkan focus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang mendalam.

3. Conclusion Drawing/Verificatin (Menarik Kesimpulan/Verifikasi)

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam peneliti kualitatif merupakan temuan yang baru, dalam penegertian lain- lain temuan tersebut masih bersifat samar-samar atau kurang jelas.

Disini peneliti berusaha memperjelas dengan menggunakan teori yang sudah teruji keberhasilannya, lalu peneliti menganalisis temuan baru tersebut sehingga menjadi jelas dengan menggunakan komponen analisis data yaitu

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan⁴⁵.

1.7.8 Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menurut Denzin ada empat macam yang membedakan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori⁴⁶

⁴⁵ Alfi Haris Wanto. (2017). *Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City*. *Jurnal of Publik Sector innovations*, Vol. 2, No. (1), hlm. 42

⁴⁶ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoirin, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo)

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota jambi

Kota Jambi merupakan sebuah kota di pulau Sumatera sekaligus menjadi Ibu Kota dari Provinsi Jambi. Secara historis, Kota Jambi baru diakui berbentuk pemerintahan ditetapkan dengan ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dengan sebutan Kota Besar. Mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1948 Kota Besar menjadi Kota Praja. Lalu berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 menjadi Kota Madya dan sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Kota Madya berubah menjadi Pemerintah Kota Jambi sampai sekarang. Kemudian Kota Jambi resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957 berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958.

Lambang Kota Jambi berupa perisai dengan bagian yang meruncing dibawah, dikelilingi 3 (tiga) garis dengan warna bagian luar putih, tengah berwarna hijau dan bagian luar berwarna putih. Garis hijau yang mengelilingi lambang pada bagian atas lebih lebar dan didalamnya tercantum tulisan “KOTA JAMBI” yang melambangkan nama daerah dan diapit oleh 2 buah bintang bersudut 5 berwarna putih, yang melambangkan kondisi kehidupan sosial masyarakat Jambi yang terdiri dari berbagai suku dan agama memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Warna dasar lambang berwarna biru langit.

Gambar 2.1 Logo Kota Jambi



Sumber: Website Pemerintah Kota Jambi

Kota Jambi memiliki motto Tanah Pilih Pusako Betuah yang berarti bahwa Kota Jambi sebagai pusat Pemerintahan Kota sekaligus sebagai pusat sosial, ekonomi, kebudayaan, yang mencerminkan jiwa masyarakatnya sebagai duta kesatuan baik secara individu, keluarga, kelompok maupun secara institusional yang lebih luas, berpegang teguh dan terikat pada nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

2.1.1 Visi dan Misi Kota Jambi

Pemerintah Kota Jambi menetapkan visi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat perencanaan pada tahun 2018-2023 yaitu “Menjadikan kota jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima”. Dalam mewujudkan visi tersebut Pemerintah Kota Jambi menetapkan 5 (lima) misi yaitu⁴⁸:

1. Penguatan birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.

⁴⁷ Pemerintah Kota Jambi, <https://www.jambikota.go.id/>. Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2023, Pukul: 21:35 WIB

⁴⁸ *Ibid*

2. Penguatan penegakan hukum, trantibmas dan kenyamanan masyarakat.
3. Penguatan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan serta penataan lingkungan.
4. Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan.
5. Meningkatkan kualitas masyarakat perkotaan.

2.1.2 Kondisi Geografis dan Pemerintahan Kota Jambi

Kota Jambi sebelah utara, barat, selatan dan timur berbatasan dengan kabupaten Muaro Jambi, dengan kata lain Kota Jambi ini wilayahnya dikelilingi oleh kabupaten Muaro Jambi. Kota Jambi berada pada ketinggian rata-rata 10 sampai 60 meter di atas permukaan laut. Secara geografis posisi Kota Jambi berada pada: 10 30'2,98"-10 40'1,07" Lintang Selatan dan 103 40'1,67"-103 40'0,22" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Jambi 205,38 km² yang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan dan 62 (enam puluh dua) kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:⁴⁹

Tabel 2.1 Tabel Luas Wilayah dan Pembagian Daerah

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan
1	Kota Baru	36,11	17,56	5
2	Alam Barajo	41,67	20,27	5
3	Jambi Selatan	11,41	5,55	5
4	Paal Merah	27,13	13,20	5

⁴⁹ Badan Pusat Statistik, Kota Jambi Dalam Angka 2022, Hlm.5

5	Jelutung	7,92	3,85	7
6	Pasar Jambi	4,02	1,96	4
7	Telanaipura	22,51	10,95	6
8	Danau Sipin	7,88	3,83	5
9	Danau Teluk	15,70	7,64	5
10	Pelayangan	15,29	7,44	6
11	Jambi Timur	15,94	7,75	9
Jumlah		205,38	100	62

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka 2022

2.1.3 Kondisi Demografis Kota Jambi

Jumlah penduduk Kota Jambi tahun 2021 berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 2020 adalah sebanyak 606.200 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 305.407 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 300.793 jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk Kota Jambi pada tahun 2020 adalah 2.952 jiwa/km², dimana kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jelutung sebesar 7.505 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Danau Teluk sebesar 817 jiwa/km².⁵⁰

2.2 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di wilayah Kota Jambi. Pembentukan instansi ini tidak terlepas dari dinamika perubahan sistem pemerintahan daerah dan semakin

⁵⁰ *Ibid.* Hlm.51

kompleksnya permasalahan lingkungan, khususnya terkait polusi, persampahan, dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

Awalnya, urusan lingkungan hidup di Kota Jambi berada di bawah naungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang dibentuk berdasarkan kebutuhan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, sesuai dengan kewenangan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁵¹

Seiring berjalannya waktu dan perubahan struktur organisasi pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dilakukan penyesuaian struktur organisasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, BLH Kota Jambi kemudian bertransformasi menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Sejak itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mulai menjalankan fungsinya secara lebih terarah dalam urusan:

1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Pengelolaan persampahan dan limbah
3. Pelestarian dan konservasi sumber daya alam
4. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
5. Edukasi dan pelibatan masyarakat dalam isu-isu lingkungan

Dalam perkembangannya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi juga aktif menginisiasi program-program berbasis lingkungan seperti program Kampung

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Iklim (ProKlim), Bank Sampah, serta pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). DLH juga menjadi pelaksana teknis untuk pemantauan kualitas air, udara, dan pengelolaan kawasan lindung di wilayah perkotaan.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terus ditingkatkan melalui penerapan sistem digital, pelayanan berbasis masyarakat, dan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat maupun mitra internasional dalam beberapa proyek lingkungan. Dengan struktur yang terus disesuaikan dan SDM yang berkembang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kini menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di tengah pesatnya pembangunan kota.

2.3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

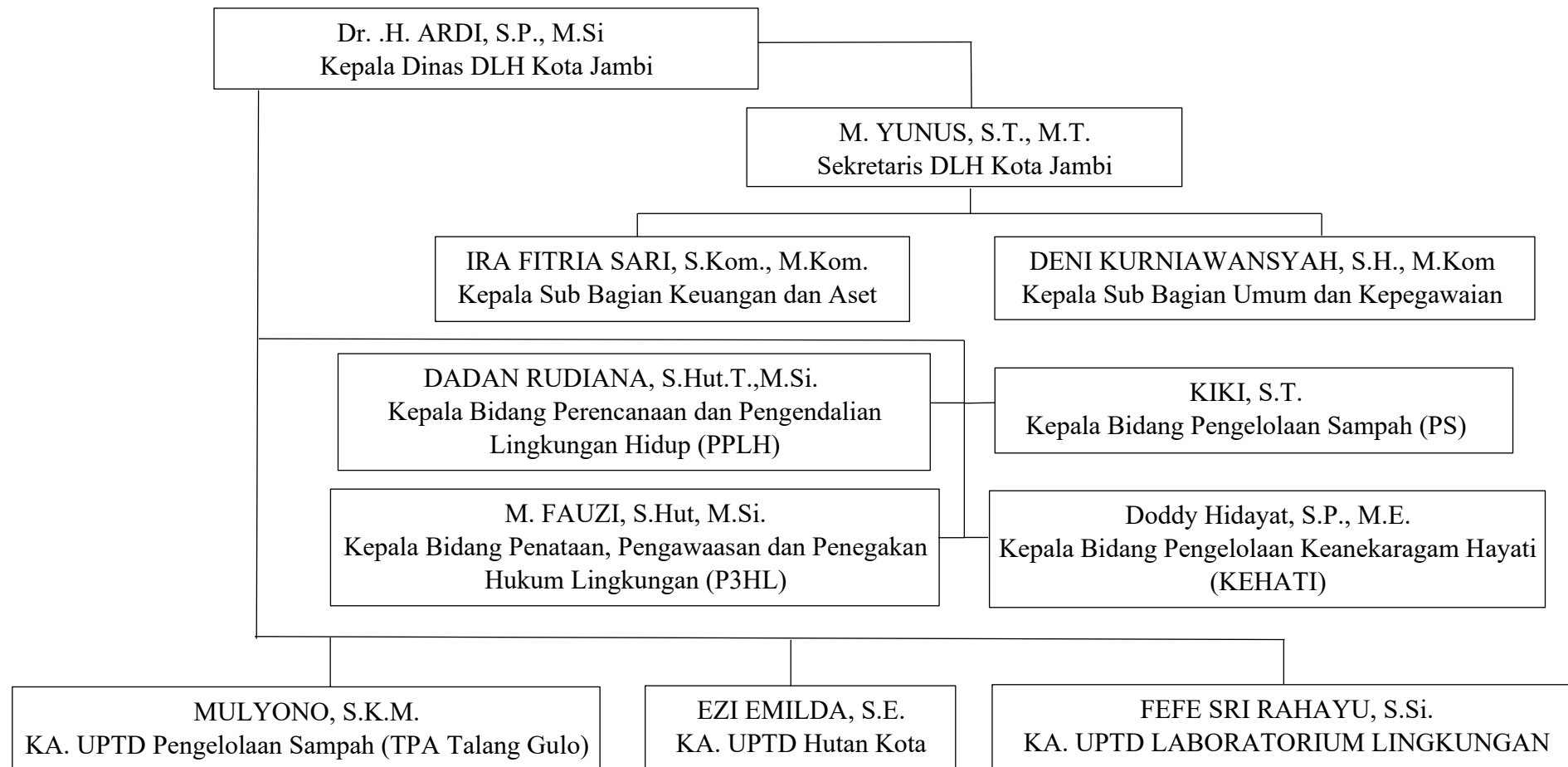
Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kota Jambi. Dinas Lingkungan Hidup beralamat di Jln H. Agus Salim No 7 Paal lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas untuk mengelola berbagai aspek terkait lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, pemantauan kualitas udara dan air, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Dalam konteks penelitian ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan menangani permasalahan terkait tempat pembuangan sampah di kota Jambi, khususnya dalam penelitian ini di Kelurahan Bagan Pete.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola urusan lingkungan hidup, termasuk persoalan pengelolaan sampah,

pencemaran lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pengendalian kerusakan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup menjadi pelaksana teknis dari kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Jambi.

Dalam struktur organisasinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terdiri dari beberapa bidang dan seksi, seperti Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam. Salah satu unit penting dalam konteks penelitian ini adalah Seksi Penanganan Sampah.

2.3.1 Struktural Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi



Kepala Dinas Lingkungan Kota Jambi adalah Bapak Dr. H. Ardi, S.P., M.Si. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berawal dari kebutuhan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang semakin kompleks akibat perkembangan kota dan peningkatan populasi. Sebelumnya, urusan lingkungan hidup ditangani oleh beberapa bagian di pemerintah kota, namun dengan meningkatnya isu-isu lingkungan seperti sampah, pencemaran, dan konservasi sumber daya alam, pemerintah Kota Jambi memandang perlu adanya instansi khusus yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup⁵².

Pada tahun-tahun awal, tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup berada di bawah dinas yang lebih umum, yang mencakup pekerjaan umum dan tata kota. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi secara resmi dibentuk untuk meningkatkan efektivitas penanganan isu-isu lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, penanganan pencemaran, dan pelaksanaan program-program penghijauan.

Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berada di bawah kepemimpinan Bapak Dr. H. Ardi, S.P., M.Si. yang memimpin berbagai inisiatif untuk menjadikan Kota Jambi sebagai kota yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan berfokus pada pengembangan fasilitas pengelolaan sampah, kampanye kebersihan, dan pengelolaan lahan hijau, Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya mengatasi tantangan lingkungan yang ada di kota ini.

⁵² <http://dlh.jambikota.go.id/landing>

2.3.2 Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup

1) Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

“Mewujudkan Kotaa Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera”

2) Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan

2.3.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, setiap bidang memiliki tugas dan fungsi spesifik yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, mengelola sampah, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Berikut adalah deskripsi umum tentang tugas dan fungsi bidang-bidang yang biasanya ada di Dinas Lingkungan Hidup:

1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah

- a) Merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga, limbah industri, dan limbah berbahaya.
- b) Mengelola tempat pembuangan akhir (TPA), termasuk pemantauan kapasitas dan penerapan teknologi pengelolaan sampah.
- c) Mengembangkan program daur ulang, pengurangan sampah, dan pengolahan limbah, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik.

2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- a) Melakukan pemantauan kualitas udara, air, dan tanah untuk mengidentifikasi sumber pencemaran.
- b) Mengawasi kepatuhan industri dan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan, termasuk pencemaran udara, air, dan tanah.
- c) Menjalankan program pengendalian pencemaran serta memberikan rekomendasi tindakan pemulihan terhadap wilayah yang terdampak pencemaran.

3) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kehutanan

- a) Melindungi dan mengelola kawasan hutan kota, taman, dan ruang terbuka hijau.
- b) Mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pelestarian flora dan fauna lokal.
- c) Mengembangkan program penghijauan, reboisasi, dan rehabilitasi lahan kritis untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

4) Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

- a) Melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
- b) Menyusun kebijakan dan standar operasional prosedur terkait pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran lingkungan.
- c) Bekerjasama dengan penegak hukum untuk menindak pelanggaran lingkungan, serta memberikan sosialisasi terkait aturan dan standar lingkungan kepada masyarakat.

5) Bidang Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat

- a) Mengadakan program sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.
- b) Memfasilitasi kegiatan komunitas untuk meningkatkan partisipasi publik dalam program lingkungan hidup, seperti pengelolaan sampah mandiri.
- c) Mengembangkan dan mendukung program partisipasi masyarakat, seperti bank sampah, pelatihan daur ulang, dan program penghijauan lingkungan.

6) Bidang Perencanaan dan Evaluasi

- a) Menyusun perencanaan strategis, program, dan anggaran untuk kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan visi dan misi.
- b) Melakukan evaluasi terhadap program-program lingkungan yang telah dilaksanakan guna meningkatkan efektivitas.
- c) Menyediakan data dan analisis mengenai kualitas lingkungan hidup sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pelaporan kepada pemerintah daerah⁵³.

2.4 Kelurahan Bagan Pete

Kelurahan Bagan Pete adalah salah satu kelurahan di Kota Jambi yang menghadapi tantangan signifikan dalam hal pengelolaan sampah. Wilayah ini memiliki populasi yang cukup padat, sehingga volume sampah yang dihasilkan

⁵³ Syahril. 2022. *Peranan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Jambi*. Universitas Batanghari : Jambi.

cukup tinggi. Infrastruktur pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete dinilai kurang memadai, ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan lahan untuk tempat pembuangan sampah, sehingga upaya pengelolaan sampah oleh pemerintah setempat sering kali mengalami kendala.

Kelurahan Bagan Pete terletak di Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Secara geografis, Bagan Pete berada di wilayah yang cukup strategis di Kota Jambi dan termasuk dalam area dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Posisi ini memberikan tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan sampah dan infrastruktur lingkungan, terutama karena keterbatasan lahan dan tingginya volume sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan saat peneliti melakukan observasi dan wawancara bersama bapak Lurah Kelurahan Bagan Pete, yaitu Bapak Faisal Iskandar, di kelurahan ini terdapat 10.000 jiwa penduduk masyarakat kelurahan Bagan Pete dan memiliki 11 RT. Wilayah terluas di Kelurahan Bagan Pete sendiri terletak di wilayah RT 11. Kelurahan Bagan Pete merupakan salah satu wilayah dengan populasi yang cukup padat di Kota Jambi. Hal ini berdampak pada peningkatan volume sampah rumah tangga dan sampah komersial, serta menimbulkan kebutuhan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah ini juga memberikan tantangan tambahan bagi pemerintah dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan hidup.

Keterbatasan lahan merupakan salah satu isu kritis di Kelurahan Bagan Pete, terutama untuk pembangunan TPS yang memadai. Kurangnya ruang untuk fasilitas pengelolaan sampah ini menyebabkan penumpukan sampah di area tertentu, sehingga perlu adanya strategi khusus dalam pengelolaan lahan. Pemerintah daerah berupaya mencari solusi, termasuk meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah untuk meminimalisir dampak keterbatasan lahan ini.

Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup berupaya mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Beberapa inisiatif yang telah diambil mencakup program edukasi dan kampanye lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, optimalisasi pengangkutan sampah, serta promosi program daur ulang. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi penghambat⁵⁴

⁵⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Bagan_Pete,_Alam_Barajo,_Jambi

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (komitmen pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini digunakan sebagai pisau analisis dalam menilai pelaksanaan kebijakan di Kelurahan Bagan Pete.

3.1.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek vital dalam implementasi kebijakan, karena keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat tergantung pada pemahaman para pelaksana dan masyarakat atas isi dan tujuan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi telah berupaya menyampaikan kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pendekatan langsung.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa proses komunikasi ini belum berjalan secara efektif di tingkat masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Faisal Iskandar, Lurah Kelurahan Bagan Pete:

*"Sudah pernah ada sosialisasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, tetapi belum semua masyarakat ikut serta. Banyak warga masih belum paham pentingnya memilah sampah atau buang sampah pada tempatnya. Mereka masih anggap ini tanggung jawab pemerintah semata"*⁵⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum menjangkau semua lapisan masyarakat secara merata. Sosialisasi dilakukan secara terbatas dan tidak berkelanjutan, sehingga informasi tidak tersampaikan dengan baik. Selain itu, seorang warga bernama Ibu Neneng juga menyampaikan hal serupa:

*"Saya belum pernah tahu ada peraturan dari pemerintah kota soal buang sampah. Biasanya kami buang saja ke lahan kosong karena memang tidak ada tempat khusus. Kadang bakar sendir"*⁵⁶

Kesaksian ini menegaskan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan informasi tentang adanya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020. Kurangnya penyampaian yang jelas dan berkelanjutan menyebabkan kebijakan yang baik di atas kertas tidak tersampaikan dengan utuh kepada masyarakat sebagai pihak pelaksana di tingkat dasar. Akibat lemahnya komunikasi ini, banyak warga yang masih membuang sampah secara sembarangan atau memilih membakar sampah sendiri.

⁵⁵ Wawancara Bersama Bapak Faisal Iskandar Lurah Kelurahan Bagan Pete. Data dan informasi 18 Oktober 2024

⁵⁶ Wawancara Bersama Ibu Neneng Warga RT.07 Kelurahan Bagan Pete. Data Informasi 24 Oktober .

3.1.2 Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor fundamental dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete, keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 secara efektif. Kelurahan Bagan Pete hingga kini belum memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) resmi. Hal ini menyebabkan warga membuang sampah secara sembarangan di lahan kosong, atau bahkan membakarnya sendiri. Keterbatasan ini ditegaskan oleh Bapak Faisal Iskandar, Lurah Kelurahan Bagan Pete:

“Belum ada TPS di daerah sini. Kalau saya lihat, warga terkadang membuang sampah keluar, atau ada yang pakai jasa pengangkut mobil sampah. Sebagian lagi membuang sampah di lahan kosong. Saya tinggal di sini kurang lebih dua tahun, dan selama itu memang belum ada TPS”⁵⁷

Selain fasilitas TPS, keterbatasan juga terjadi pada armada pengangkut sampah. Idealnya, truk pengangkut harus datang minimal tiga hingga empat kali per hari untuk mengatasi volume sampah dari rumah tangga dan usaha kecil. Namun dalam kenyataannya, armada hanya datang satu kali per hari. Hal ini disampaikan oleh Bapak Firman Ariyanto, ST, selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi:

“Kalau idealnya itu pengangkutan bisa sampai tiga atau empat kali sehari. Tapi kondisi sekarang truk cuma bisa sekali datang. Itu pun

⁵⁷ Wawancara Bersama Bapak Faisal Iskandar Lurah Kelurahan Bagan Pete. Data dan informasi 18 Oktober 2024

kadang ktidak tepat waktu, karena armada kita terbatas. Anggaran juga terbatas, itu yang menyebabkan pengelolaan jadi keteteran”⁵⁸

Keterbatasan sumber daya juga terlihat dari minimnya dukungan anggaran, terutama untuk pengadaan TPS, bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, dan tenaga kerja operasional. Hal ini berdampak langsung pada frekuensi dan jangkauan pelayanan pengangkutan sampah. Selain dari pihak pemerintah, sebagian warga menggunakan jasa swasta atau pengelolaan mandiri. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Neli, warga RT 10:

“Kalau kami di RT sini ada yang pakai gerobak motor, ada juga mobil pribadi yang kami sewa bareng-bareng untuk angkut sampah. Tapi itu bukan dari pemerintah, kami swadaya sendiri”⁵⁹

Hal ini menunjukkan bahwa, di tengah keterbatasan sumber daya pemerintah, masyarakat mulai mencari alternatif solusi. Namun solusi tersebut belum terkoordinasi dengan baik dan masih bersifat sementara.

3.1.3 Disposisi

Disposisi dalam teori implementasi George C. Edward III merujuk pada sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan isi kebijakan secara konsisten dan serius. Dalam konteks Kelurahan Bagan Pete, disposisi pelaksana kebijakan—baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat—menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas pengelolaan sampah.

⁵⁸ Wawancara Bersama Bapak Kasih Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Firman Ariyanto, ST Data dan Informasi 01 Oktober 2024

⁵⁹ Wawancara Bersama Ibu Neli Warga RT.10 Kelurahan Bagan Pete. Data Informasi 24 Oktober 2024

Dari sisi instansi pelaksana, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menunjukkan komitmen dengan menyusun Masterplan Pengelolaan Sampah, yang merupakan bagian dari Rencana Induk Persampahan Kota Jambi. Rencana ini diharapkan menjadi pedoman resmi yang mengatur sistem pengelolaan sampah berbasis wilayah, termasuk penerapan sistem door to door (penjemputan sampah langsung dari rumah warga). Namun, implementasi rencana ini belum berjalan karena masih dalam proses legalisasi. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Firman Ariyanto, ST, Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi:

“Rencana ke depan itu kita mau ubah sistem dari tempat pembuangan ke sistem door to door. Jadi truk langsung ambil ke rumah warga. Tapi untuk itu kita harus punya dasar hukum. Makanya kita susun Masterplan, tapi masih dalam proses pengesahan. Belum bisa kita terapkan sekarang”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun ada keseriusan dari pemerintah kota untuk berinovasi, namun pelaksanaannya tertunda oleh prosedur birokrasi dan keterbatasan legalitas. Sementara itu, dari sisi pemerintah kelurahan, komitmen dalam mendukung pengelolaan sampah masih bersifat administratif. Menurut Bapak Faisal Iskandar, Lurah Bagan Pete:

“Kami di kelurahan sebatas mengarahkan warga untuk buang sampah ke tempat yang benar. Tapi karena belum ada TPS, ya susah juga. Kalau untuk pengawasan dan pengangkutan, itu ranah Dinas Lingkungan Hidup”⁶¹

⁶⁰ Wawancara Bersama Bapak Kasih Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Firman Ariyanto, ST Data dan Informasi 01 Oktober 2024

⁶¹ Wawancara Bersama Bapak Faisal Iskandar Lurah Kelurahan Bagan Pete. Data dan Informasi 18 Oktober 2024

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pelaksana di tingkat kelurahan belum secara aktif terlibat dalam pengawasan dan penguatan peran warga dalam pengelolaan sampah. Disposisi mereka lebih bersifat pasif dan menunggu arahan dari dinas teknis. Dari sisi masyarakat, disposisi juga masih rendah. Banyak warga yang belum merasa bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Sebagian besar masih menganggap bahwa urusan sampah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Hal ini sejalan dengan wawancara Bapak Toni, warga RT 06:

“Kalau bisa ya pemerintah siapkan tempat buang sampah, jangan kami yang repot-repot. Kami juga sudah bayar pajak, masa masih harus urus sampah sendiri”⁶²

Sikap seperti ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kemauan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah masih rendah. Ini menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan yang menekankan pada prinsip partisipasi masyarakat.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan karena menyangkut bagaimana perintah dijalankan, siapa yang bertanggung jawab, serta sejauh mana koordinasi dilakukan antar instansi dan pelaksana teknis. Berdasarkan teori George C. Edward III, struktur birokrasi yang efektif mencakup mekanisme kerja yang jelas, prosedur yang standar, dan jalur koordinasi yang terdefinisi.

⁶² Wawancara Bersama Bapak Toni warga Rt.06. Data dan Informasi 18 Oktober 2024

Namun, dalam konteks pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete, struktur birokrasi belum berjalan secara efektif. Tidak tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme pengelolaan sampah di tingkat RT/RW, sehingga pelaksanaan kebijakan cenderung bersifat spontan dan tidak terkoordinasi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Faisal Iskandar, Lurah Bagan Pete:

“Kami di kelurahan belum punya SOP resmi soal penanganan sampah di tingkat RT. Jadi kalau ada warga yang buang sampah sembarangan, ya kita hanya bisa tegur. Tapi tidak bisa kasih sanksi karena tidak ada dasar hukumnya di kelurahan”⁶³

Ketiadaan SOP ini juga menghambat fungsi pengawasan. Aparatur kelurahan tidak memiliki landasan atau wewenang jelas untuk memberikan sanksi atau teguran kepada pelanggar. Padahal dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020, telah diatur sanksi administratif bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Namun, penegakan hukum tersebut tidak dijalankan secara konsisten di lapangan.

Lebih lanjut, dari sisi koordinasi antar instansi, masih ditemukan kesenjangan antara Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kelurahan. Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis tidak memiliki unit pengawasan khusus di lapangan, sehingga banyak kebijakan yang masih belum terlaksanakan dan tidak disertai dengan pelibatan aktif pihak kelurahan atau tokoh masyarakat.

⁶³ Wawancara Bersama Bapak Faisal Iskandar Lurah Kelurahan Bagan Pete. Data dan Informasi 18 Oktober 2024

Hal ini diakui oleh Bapak Firman Ariyanto, ST dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi:

“Untuk penegakan sanksi dan pengawasan di lapangan memang belum maksimal. Kita lebih banyak fokus pada operasional pengangkutan. Jadi memang perlu dukungan dari kelurahan dan RT, tapi saat ini belum ada sistem koordinasi rutin”⁶⁴

Kurangnya sistem pelaporan, minimnya forum koordinasi antar instansi, serta tidak adanya sistem pemantauan berbasis data menjadi tantangan tersendiri dalam birokrasi pengelolaan sampah. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan menjadi lambat, tidak merata, dan kurang terukur.

Selain melalui standar Operasional Prosedur (SOP) petugas juga melibatkan diri dalam proses implementasi kebijakan keterbukaan informasi public dengan melakukan koordinasi di dalam struktur birokrasi. Hal ini dikarenakan bahwa kebijakan keterbukaan informasi public tidak hanya terbatas pada tingkat Pemerintahan Kota melainkan juga melibatkan OPD dan diimplementasikan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Jambi.

3.2 Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Tempat

Pembuangan Sampah di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki beberapa strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk menangani persoalan pengelolaan sampah, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat produksi sampah tinggi seperti Kelurahan Bagan Pete. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firman

⁶⁴ Wawancara Bersama Bapak Kasih Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Firman Ariyanto, ST Data dan Informasi 01 Oktober 2024

Ariyanto, ST, selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, beberapa strategi berikut telah dan sedang dijalankan:

1. Penyusunan Masterplan Persampahan Kota Jambi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tengah menyusun Rencana Induk Pengelolaan Sampah (Masterplan) sebagai strategi jangka panjang untuk membenahi sistem persampahan di seluruh wilayah kota, termasuk Bagan Pete. Rencana ini dirancang untuk menjadi dasar hukum dan teknis dalam perubahan sistem layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah.

“Kami sedang menyusun Masterplan untuk pengelolaan sampah seluruh Kota Jambi. Salah satunya nanti akan mengatur perubahan sistem dari buang ke TPS ke sistem door to door. Ini masih dalam proses legalisasi oleh Bappeda”

2. Pengembangan Sistem Door to Door

Dinas Lingkungan Hidup merencanakan perubahan sistem layanan sampah dari berbasis TPS menjadi sistem door to door, yaitu truk pengangkut akan mengambil sampah langsung dari rumah warga. Strategi ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan kurangnya TPS dan mencegah pembuangan liar.

“Nanti akan diberlakukan sistem pengangkutan langsung dari rumah ke rumah. Tapi untuk itu kita butuh tambahan armada dan legalisasi regulasi. Tidak bisa serta merta diterapkan”

3. Penambahan Armada dan Petugas Lapangan

Dinas Lingkungan Hidup juga berencana untuk menambah jumlah armada truk sampah dan tenaga operasional, karena selama ini jumlah armada tidak mencukupi untuk menjangkau semua wilayah secara optimal. Dalam kondisi

sekarang, truk hanya datang satu kali per hari di wilayah padat penduduk seperti Bagan Pete.

“Saat ini truk kita terbatas, makanya belum bisa meng-cover semua wilayah seperti Bagan Pete dengan intensitas tinggi. Idealnya bisa 3–4 kali sehari, tapi faktanya sekarang cuma bisa sekali”⁶⁵

4. Peningkatan Retribusi Pengelolaan Sampah

Dalam strategi jangka menengah, Dinas Lingkungan Hidup juga mengusulkan kenaikan retribusi pengelolaan sampah dari Rp 5.000 menjadi Rp 25.000 per KK per bulan. Kenaikan ini akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan mendukung sistem pengangkutan baru. Namun, strategi ini masih mendapat penolakan dari sebagian masyarakat karena dianggap memberatkan.

“Dengan sistem baru, kami rencanakan biaya Rp 25.000 per rumah. Tapi memang butuh waktu karena masyarakat belum siap. Saat ini masih kami kaji.”

5. Edukasi dan Sosialisasi Lingkungan

Sebagai strategi pendukung, Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan lingkungan hidup di sekolah dan kelurahan. Namun kegiatan ini masih terbatas intensitasnya.

“Edukasi sudah berjalan tapi memang belum rutin. Ke depan kami ingin lebih banyak melibatkan sekolah dan tokoh masyarakat untuk kampanye pengurangan sampah.”

⁶⁵ Wawancara Bersama Bapak Kasih Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Firman Ariyanto, ST Data dan Informasi 01 Oktober 2024

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek infrastruktur, kelembagaan, maupun partisipasi masyarakat. Ketiadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), terbatasnya armada pengangkut, serta kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan optimal.
2. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi meliputi:
 1. Penyusunan *Masterplan* atau Rencana Induk Persampahan.
 2. Perencanaan sistem pengangkutan *door to door*.
 3. Usulan peningkatan retribusi layanan sampah.
 4. Penambahan armada dan petugas operasional.
 5. Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Namun, strategi tersebut sebagian besar masih dalam tahap perencanaan dan belum seluruhnya terealisasi di Kelurahan Bagan Pete.

3. Efektivitas strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Bagan Pete masih rendah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen pelaksana di tingkat lokal, serta belum adanya sistem birokrasi dan penegakan hukum yang kuat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan Kesimpulan yang telah disampaikan maka peneliti memberikan masukan atau saran yang diharapkan kedepannya dapat membantu pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi, yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi perlu mempercepat realisasi pembangunan TPS di wilayah Kelurahan Bagan Pete sebagai fasilitas dasar pengelolaan sampah.
2. Pemerintah perlu segera melegalkan dan mengimplementasikan Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Jambi, agar sistem seperti *door to door* dan skema retribusi baru dapat diterapkan secara terstruktur dan memiliki dasar hukum yang kuat.
3. Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, kelurahan, dan RT/RW perlu diperkuat melalui penyusunan SOP pengelolaan sampah berbasis wilayah, serta pembentukan unit pengawasan lingkungan di tingkat kelurahan.
4. Diperlukan edukasi lingkungan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilahan dan pembuangan sampah yang benar. Edukasi bisa

dilakukan melalui sekolah, pengajian, tokoh masyarakat, serta kampanye media sosial.

5. Partisipasi aktif masyarakat harus didorong melalui pemberdayaan bank sampah, insentif lingkungan, atau program gotong royong berbasis RT. Strategi pengelolaan sampah tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan.
6. Penelitian ini juga merekomendasikan agar pemerintah kota membuka ruang kemitraan dengan sektor swasta atau LSM, baik dalam bentuk pengadaan fasilitas, inovasi teknologi pengolahan, maupun pemberdayaan ekonomi dari sampah (ekonomi sirkular).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak. hlm.7
- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoirin. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. Hal.76
- Bambang H. S. 2017. *Manajemen Sampah: Teori dan Praktik*. Penerbit Gemulun Indonesia.
- Joko Pramono, 2020, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, (Surakarta: Unisiri Press) Hlm.3
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Pedoman Umum Pengelolaan Sampah untuk Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, hlm. 10–11
- Lantip Diat Prasojo, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: Anggota Ikatan Penerbit
- Lexy J. Moleong 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm.5
- Leo Agustino, 2012, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta) Hlm. 149-153
- Sugiyono. 2008. *Metodoe penelitian kuantitatif, kualitatif*, Bandung: Alfabeta hlm. 1
- Irawan Soeharto.2008.*Metode Penelitian Sosial*, Bandung,PT Remaja Rosdakarya. hlm.67
- Sutrajad. 2010. *Kiat Pengembangan Tempat Sampah Melalui Wirausaha*. Jakarta:PT.Bumi Aksara.
- Quinn, J. B. (1980). *Strategies for Change: Logical Incrementalism*. Homewood, IL: Irwin
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management*. New York: Free Press.
- Miles, R. E., & Snow, C. C. (1978). *Organizational Strategy, Structure, and Process*. New York: McGraw-Hill.
- M. Irfan Islamy, 2016, Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara) Hlm.17

Humphrey, A. (2005). "SWOT Analysis for Management Consulting", *SRI International*

Putri, R. D., & Hadi, S. (2020). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Lingkungan di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Lingkungan, 18(1), 67-75

Tchobanoglous, George, Hilary Theisen, dan Samuel A. Vigil. *Manajemen Sampah Padat Terpadu: Prinsip-Prinsip Teknik dan Isu-isu Manajemen*. New York: McGraw-Hill, 1993.

Kurniawan, T. A., et al. (2021). Challenges and strategies for sustainable plastic waste management in Indonesia. *Environmental Science & Policy*, 123, 1-11.

Skripsi

Adinda Qori T.M. 2017. *Strategi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Wisata Desa Dikota Pekanbaru*. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau.

Mei Sari. 2020. *Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Perspektif Ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung.

Rike Martha Yulia. 2021. *Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Negeri Ar-Ranir.

Jurnal

Agung Nurrahman, dkk. 2019. *Kepemimpinan Lurah Dalam Pengelolaan Bank Sampah Di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik. Vol. 3, No. 1. Februari 2024. hlm. 13-27

Dinda Clasissa Aulia, dkk. 2016. Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskemas). Vol. 1, No. 1, 2 Desember 2023, Hal. 62-70 DOI: doi.org/10.31849/pengmaskemas.v1i1/5516. P-ISSN 2809-6428 | E-ISSN 2809-5251.

Devi Hernawati, Chairul Saleh, Dan Suwondo. 2005. *Studi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang*. Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2. Hlm. 181-187.

Kartika, Fitriani, & Rifai, Ahmad. 2015. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah*. . Jurnal Penerbit Lokal, Vol 2 No 3. Hlm 23-35

Kurniawan dan Sihombing, “*Tata Kelola Pemerintahan dan Strategi Pembangunan,*” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 2 (2020): 115–123.

Utomo, Budi, & Oktaviani, Rina. 2004. Pengelolaan Sampah Kota di Indonesia: Tantangan dan Prospek. *Jurnal Angkdwipa*. Vol 2. No 3. Hlm 31

Anggunisa Heryeni, S. S., Syarifuddin, H., & Ilham, I. (2024). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Persepsi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui TPS 3R Sulur Berkah dan Makmur Jaya di Kota Jambi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 6(2), 40–51

Yuliana, “*Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan COVID-19,*” *Jurnal Governance and Civil Society (JGCS)*, Vol. 2, No. 1 (2021): 42–50

Website

<http://dlh.jambikota.go.id/landing>

https://id.wikipedia.org/wiki/Bagan_Pete,_Alam_Barajo,_Jambi

<https://jambi.pikiran-rakyat.com/jambi-raya/pr-3469419258/warga-antusias-gotong-royong-tapi-keluhkan-jalan-rusak-dan-drainase-buruk-di-bagan-pete>

Pemerintah Kota Jambi, <https://www.jambikota.go.id/>. Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2023, Pukul: 21:35 WIB

<https://jambi.pikiran-rakyat.com/jambi-raya/pr-3469419258/warga-antusias-gotong-royong-tapi-keluhkan-jalan-rusak-dan-drainase-buruk-di-bagan-pete/>

<https://www.radarjambi.co.id/amp/2018/12/09/18635/warga-4-kelurahan-blokir-jalan-tb-sriwijaya-kesal-garagara-sampah-menumpuk/>

<https://www.unja.ac.id/dosen-prodi-kesmas-latih-warga-mengolah-sampah-rumah-tangga-menjadi-pupuk-organik-cair/>

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

➤ Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

1. Apa saja tujuan utama dari strategi penanganan tempat pembuangan tempat pembuangan sampah yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi?
2. Strategi apa saja yang telah diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani masalah tempat pembuangan sampah?
3. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup merancang dan mengimplementasikan strategi tersebut?
4. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi penanganan tempat pembuangan sampah?
5. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mengukur efektivitas dari strategi yang diterapkan?
6. Apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengevaluasi penanganan tempat pembuangan sampah?
7. Apakah ada contoh kasus atau data yang menunjukkan dampak dari strategi yang telah diterapkan?
8. Bagaimana peran masyarakat dalam strategi penanganan tempat pembuangan sampah?
9. Apa bentuk keterlibatan stakeholder lain (misalnya pemerintah daerah, sector swasta) dalam penanganan tempat pembuangan sampah?
10. Apakah ada kebijakan atau regulasi khusus yang mempengaruhi strategi penanganan tempat pembuangan sampah di daerah ini?
11. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup beradaptasi dengan perubahan kebijakan atau regulasi terkait pengelolaan sampah?
12. Apakah ada teknologi atau inovasi baru yang diterapkan dalam strategi penanganan tempat pembuangan sampah?
13. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah

14. Apa rencana Dinas Lingkungan Hidup untuk pengembangan dan perbaikan strategi penanganan tempat pembuangan sampah?
15. Apa harapan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pencapaian target pengelolaan sampah di tahun-tahun mendatang?

➤ Untuk Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi

1. Untuk dikelurahan Bagan Pete ini total jumlah warganya ada berapa, dan berapa jumlah RT yang ada dikelurahan Bagan Pete?
2. Bagaimana pengelolaan sampah dikelurahan Bagan Pete ini?
3. Berapa jumlah TPS resmi yang ada dikelurahan Bagan Pete ini?
4. Sejak kapan masalah kurang adanya TPS resmi ini terjadi?
5. Apa yang terjadi kendala sehingga kurang tersedianya TPS yang ada?
6. Apakah sudah ada upaya yang dilakukan untuk penambahan jumlah TPS resmi dimasyarakat?
7. Kendala apa saja yang menyebabkan sehingga tidak adanya penambahan jumlah TPS resmi?
8. Jika dalam mengatasi permasalahan sampah ini tidak melalui ketersedianya jumlah TPS, lalu upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah ini?
9. Bagaimana peran dan upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup?
10. Apa target dan harapan pihak kelurahan untuk pencapaian pengelolaan sampah ditahun-tahun selanjutnya?

➤ Untuk Masyarakat Bagan Pete Kota Jambi

1. Untuk di Kelurahan Bagan Pete ini apakah ada tersedia TPS resmi yang dikelola dari pihak kelurahan?
2. Lalu sejak kapan di Kelurahan Bagan Pete ini tidak adanya TPS?
3. Jadi untuk buang sampai ini Bapak/Ibu lakukan dimana?
4. Apakah sudah ada upaya yang dilakukan dari masyarakat sini untuk mengajukan pembuatan TPS resmi di Kelurahan Bagan Pete ini?

5. Bagaimana dampak yang dirasakan dengan tidak tersedianya TPS di Kelurahan Bagan Pete ini?
6. Apakah ada petugas kebersihan yang melakukan pengambilan sampah dari rumah ke rumah, dan berapa tarif retribusi untuk perbulannya?
7. Apakah petugas tersebut dikelola langsung dari Kelurahan atau bagaimana?
8. Dengan adanya petugas yang mengambil sampah-sampah ini, apakah sudah membantu dalam permasalahan kurangnya TPS yang tersedia?
9. Bagaimana harapan Bapak/Ibu untuk permasalahan tempat sampah di tahun-tahun selanjutnya?

2. Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. 082179884053, 082185048578/email:hukum@unja.ac.id/laman:law.unja.ac.id

Nomor : 4827/UN21.4/PT.01.04/2024
Lampiran : -
Hal : Pengantar izin penelitian dan Permintaan Data Skripsi

18 September 2024

Yth

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
 2. Lurah Bagan Peta Kota Jambi
- di
Tempat

Dengan hormat, kami mengharapkan bantuannya untuk dapat memberikan izin penelitian dan permintaan data kepada mahasiswa

Nama : Melaniya

Nomor Induk Mahasiswa : H1A118038

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Sehubungan dengan penulisan Skripsi Yang Berjudul “ **Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Tempat Pembuangan Sampah Di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi** ” Setelah mahasiswa tersebut diatas melakukan penelitian dan permintaan data, mohon kiranya dapat mengirimkan surat kepada kami bahwa mahasiswa tersebut benar melakukan penelitian.

Demikian atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama, dan
Sistem Informasi Fakultas Hukum,



Dr. Muskibah, S.H., M.Hum.
NIP 196512041990032001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jl. Jenderal Basuki Rahmat Kota Baru No. 08 Kota Baru Jambi 36128
 Telp. (0741) 444015 Fax. (0741) 40032
 Email : dlhkota2017@gmail.com Website : dlh.jambikota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : HMS.03.03/ 326 /DLH.3/X/2024

DASAR : Surat dari Universitas Jambi Fakultas Hukum Nomor:
 4827/UN21.4/PT.01.04/2024 Tanggal 18 September 2024 Perihal Pengantar
 Izin Penelitian dan Permintaan Data Skripsi.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. H. ARDI SP, M.Si
 Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Melaniya
 NIM : H1A118038
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Judul : "Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Tempat
 Pembuangan Sampah Di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi"

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di Bidang
 Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jambi, 01 Oktober 2024

An. KEPALADINAS LINGKUNGAN
 HIDUP KOTA JAMBI

Kabid Pengelolaan Sampah





PEMERINTAH KOTA JAMBI
KECAMATAN ALAM BARAJO
KELURAHAN BAGAN PETE

Jalan Lingkar Barat II Rt. 07 Kelurahan Bagan Pete- Kota Jambi Kode Pos : 36361 Jambi

Nomor : PD.02.01/ 41 /BP
 Lampiran : -
 Perihal : Balasan Surat Ijin Permohonan
Penelitian dan Permintaan Data Skripsi

Jambi, 18 Oktober 2024

Kepada Yth :
 Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
 FAKULTAS HUKUM UNIV. JAMBI
 di-
 JAMBI

Menindaklanjuti surat dari Universitas Jambi Fakultas Hukum Nomor : 4827/UN21.4/PT.01.04/2024 tanggal 18 September 2024 perihal Pengantar Izin Penelitian dan Permintaan Data Skripsi, maka dengan ini kami memberikan ijin untuk melakukan Pengambilan Data Skripsi dengan judul "STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI KELURAHAN BAGAN PETE KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI" kepada:

Nama : Melaniya
 NIM : H1A118038
 Program Study : Ilmu Pemerintahan

dan benar mahasiswi diatas telah melakukan penelitian di Wilayah Kerja Kelurahan Bagan Pete.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.


 Sekretaris
NOVA CARLA CAROLINA, S.Pt
 NIP. 19730712 200804 2 001

4. Dokumentasi Wawancara

1. *Wawancara bersama Bapak Firman Ariyanto, S.T. selaku Kepala Kasi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi*



2. *Wawancara Bersama Bapak Faisal Iskandar A.Md. selaku Lurah Bagan Pete Kota Jambi*



3. *Wawancara Bersama Masyarakat Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi*





CURICULUM VITAE

5. Data Diri

Nama : Melaniya
 Tempat dan Tanggal lahir : Nipang Panjang, 04 Januari 2000
 NIM : H1118038
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat KTP : Lrg. Pattimura, Gg Bustanul
 Mukmin Kenali Besar, Kec Kota
 Baru Kota Jambi
 No Telepon : 0822 8103 1610
 Email : melaniya410@gmail.com



6. Riwayat Pendidikan

Periode	Sekolah/Universitas	Jurusan	Masa Pendidikan
2006 – 2012	SD N 40 Sungai Itik	-	6 Tahun
2012-2015	SMP N 6 Tanjung Jabung Timur	-	3 Tahun
2015-2018	SMA N 6 Tanjung Jabung Timur	IPS	3 Tahun